



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 230 /180/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
7/180/2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penambahan Rancangan Peraturan Walikota Pariaman ke dalam daftar Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 7/180/2026 Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 7/180/2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Sebanyak 1 (satu) Rancangan Peraturan Wali Kota ditambahkan ke dalam daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Juni 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ANGG HUKUM	
STAF KECAMATAN PERATU DAN KAWANDANG UNDAK	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 230 /180/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
7/180/2026 TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2026

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
48.	Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Tata cara dan syarat dalam pemberian izin tugas belajar Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan wali Kota Pariaman Nomor Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Perubahan terhadap Perwako Nomor 9 Tahun 2014 dan Perwako Nomor 23 Tahun 2012	Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan Daerah Juni 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAR PARIAMAN	
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT	
APANG HUKUM	
RANCANGAN PERATURAN DIT UNDANGKAN	